

# REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI ALAT UKUR EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Daryanti\*<sup>1</sup>, Maria Angelina Ua<sup>2</sup>

Jl. Andi Tonro No 17, Tlp (0411) 854974

Jurusan Akuntansi, STIE YPUP Makassar

E-mail: \*<sup>1</sup>[daryanti@gmail.com](mailto:daryanti@gmail.com), <sup>2</sup>[angelinaboyang@gmail.com](mailto:angelinaboyang@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah dari 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Departemen Air, Sumber Daya dan Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dari anggaran Pendapatan Daerah untuk tahun fiskal 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengembangan efektivitas manajemen keuangan dalam pekerjaan Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun fiskal 2015-2017 dapat dikatakan efektif, yaitu, memiliki rasio efektivitas rata-rata di bawah 100%, yang hanya mencapai 97,16%.

**Kata Kunci:** Revenue Lokal Lokal, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas.

## Abstract

*This research aims to determine the financial performance of the Water Resources, Office and the Layout of the Province of South Sulawesi by calculating Regional Original Income from 2015-2017. The data used are secondary data obtained from the Departemen of Water, Resources and spatial planning of south Sulawesi Province in the from of Regional Revenue budgets for the 2015-2017 fiscal year. The results of this study indicate that, the development of the effectiveness of financial management in the work of the copyrighted water resources and the layout of the south sulawesi province during the 2015-2017 fiscal year can be said to be effective, namely, having an average effectiveness ratio below 100%, which only reaches 97,16%.*

**Keywords:** Locally Generation Revenue, Financial Performance, Effektivness Ratio

## PENDAHULUAN

Globalisasi sekarang ini, setiap perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat. Keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi. Artinya daerah otonomi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola

dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai, membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan.

Setiap organisasi pemerintah pasti menginginkan tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih lagi di

masa globalisasi seperti sekarang ini, untuk itu pemerintahan harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan realisasi merupakan alat ukur untuk melihat efektivitas kinerja keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik optimal serta upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah. Alasan dilakukan analisis terhadap laporan realisasi pendapatan asli daerah adalah menilai kinerja keuangan instansi pemerintah. Dimana menilai kinerja untuk mengetahui tingkat efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat betapa pentingnya dilakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan, maka peneliti akan membahas mengenai “Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntan**

Pengertian akuntansi menurut Syaiful bahri (2016), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikthisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistemasi dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum.

Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis (*the language of business*). Menurut H.Lili M.Sadeli (2015) dalam buku *American Accounting Association*, Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para pengguna informasi tersebut.

### **Akuntansi Pemerintah**

Menurut Sugijanto, dkk (2017:258) dalam buku Forum Studi Keuangan Negara, Akuntansi Pemerintahan adalah aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, pelaporan transaksi-transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unit serta penafsiran atas aktivitasnya.

Mursyidi (2009) menjelaskan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi masyarakat dan departemen-departemen dibawahnya. Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK (2012) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun secara periodik dan periode tahunan. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah serta menunjukkan pencapaiannya dalam periode tertentu.

Sudah menjadi kewajiban setiap pemerintahan daerah untuk membuat dan melaporkan keuangannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi keuangan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepannya.

Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sebagai pendapatan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan daerah.

### **Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang No 11 tahun 2007, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain – Lain Pendapatan yang Sah

### **Target Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2007:103) untuk memperoleh target

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencapaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih dengan tahun berjalan.
3. Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

### **Analisis Laporan Realisasi**

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu. Analisis laporan realisasi anggaran adalah mengkaji secara mendalam tentang laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, yang terdiri atas indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Penggumpulan data tersebut dilakukan untuk kehematan,

efektivitas, efisiensi, dan mutu pencapaian sasaran.

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan dan hasil rasio tersebut dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisien dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas merupakan hubungan dengan keluaran atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01%-100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja keuangan akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk kinerja keuangan.

### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yaitu bertanya secara langsung kepada pegawai dinas sumberdaya air cipta karya dan tata ruang provinsi sulsel serta mengumpulkan, mencatat dan melakukan pengkajian data, baik yang

bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ialah rasio efektifitas periode 2015-2017 dengan persamaan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Anggaran Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

### HASIL PENELITIAN

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasi penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil perhitungan Rasio efektifitas pada kantor dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{21.700.000.000.000}{21.700.000.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{20.520.000.000.000}{20.520.000.000.000} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{16.140.000.000.000}{17.640.000.000.000} \times 100\% = 91,49\%$$

### Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD pada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015-2017

Thn	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Prese ntase (%)	Kinerja
2015	21.700.000.000	21.700.000000	100	Efektif
2016	20.520.000.000	20.520.000.000	100	Efektif

2017	17.640.000.000	16.140.000.000	91,49	Cukup Efektif
	Jumlah	Rata-rata	97,16 %	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dalam kurun waktu tiga tahun, rasio efektivitas pada kantor dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi atau ketidaketapan. Rasio terendah adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 91,49%, hal ini disebabkan karena anggaran PAD lebih besar dari pada PAD yang terealisasi. Dan pada tahun 2015 dan 2016 seimbang karena PAD yang direalisasi sama dengan PAD yang dianggarkan.

Pada dasarnya perhitungan pada table diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD keuangan pada dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sul-Sel pada tahun 2015 sebesar 100% , tahun 2016 sebesar 100%, dan tahun 2017 sebesar 91,49%. Efektivitas kinerja keuangan pada dinas SDA CK-TR untuk tahun 2015 dan tahun 2016 berjalan efektif karena efektivitas yang tercapai adalah 100%, dan tahun 2017 dikatakan cukup efektif.

Menurut uraian pada tabel diatas perhitungan, Efektivitas Kinerja Keuangan pada dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, cukup efektif karena rata-rata efektifitasnya yaitu 97,16%. Hal ini disebabkan karena penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan ditahun 2017.

### **Pembahasan**

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau (100%).

Hasil perhitungan dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015-2017, menggambarkan bahwa dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai target efektif, karena telah mencapai angka 100%. Walaupun di tahun 2017 masuk dalam kriteria cukup efektif, karena rasio efektifitasnya hanya mencapai 91,49%. pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan anggaran atau target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis perbandingan rasio efektifitas, dapat di ketahui bahwa keuangan daerah dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang dari tahun 2015-2017 rata-ratanya berkisar dari angka 90-100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan pada dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektif. Tetapi jika dibandingkan dengan kriteria yang dikeluarkan oleh (Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996), maka prosentase yang dicapai oleh dinas Sumber Daya Air, Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kinerja yang efektif. Karena menurut Kepmendagri prosentase kinerja efektivitas dari 90-100% berarti dikatakan efektif, jadi jika dihitung berdasarkan kriteria prosentase menurut Mahmudi maka kinerja keuangan pada kantor dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sulawesi Selatan termasuk cukup efektif belum mencapai kata efektif. Oleh sebab itu kantor dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan harus meningkatkan presentase kinerja keuangannya dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan pemungutan pajak dan retribusi usaha.

### **KESIMPULAN**

1. Perkembangan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan pada dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun anggaran 2015-2017 dapat dikatakan cukup efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektifitas rata-rata 97,16%.
2. Efektivitas dalam mengolah PAD pada kantor dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dari perhitungan rasio efektifitas yang dari tahun anggaran 2015 sebesar 100%, tahun anggaran 2016 sebesar 100%, yang berarti telah mencapai kriteria yang dapat dikatakan efektif karena mencapai 100%, dan tahun anggaran 2017 sebesar 91,49% yang artinya mengalami penurunan namun masih dikatakan cukup efektif karena mencapai angka antara 90-99% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sul-Sel agar dapat

meningkatkan lagi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat dari tahun sebelumnya dengan memaksimalkan retribusi usaha dan retribusi lainnya, karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan cc tersebut masih kecil. Sehingga nantinya apabila tiap tahun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat maka kinerja pemerintah juga akan menjadi lebih baik dan lebih efektif.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada penelitian ini. Terutama pimpinan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Prov Sul-Sel dan seluruh jajarannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baht, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 1. Andi Yogyakarta.
- Sadeli, H. Lili M. 2015. *Dasar – Dasar Akuntansi*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugijanto, dkk. 2017. *Forum Studi Keuangan Negara*. Cetakan 1. Diandra Kreatif. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refirika Aditama. Bandung.
- Suriadinata. 2007. *Kajian Tentang Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.